

RENCANA KERJA TAHUNAN

2025



PANGKALAN PSDKP TUAL

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen turunan dari Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PSDKP tahun 2025-2029. Rencana Kerja Tahunan memberikan panduan, pedoman bagi Pangkalan Pengawasan SDKP Tual dalam menjalankan program pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan pada tahun 2025.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2025 menjabarkan program, output, dan kegiatan-kegiatan prioritas Pangkalan Pengawasan SDKP Tual dalam pelaksanaan fungsi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, yang dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja (Renja) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tahun 2025.

Saran dan masukan dalam rangka perbaikan kedepan sangat kami harapkan. Juga kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan aktif, sehingga Rencana Kerja Tahunan (RKT) Pangkalan Pengawasan SDKP Tual tahun 2025 ini dapat disusun.

Tual, 24 Maret 2025

Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan Tual



Frik Sostenes, S.St.Pi, M.Si

NIP. 198503162007011006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR.....	4
BAB I	5
PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang.....	5
B. Struktur Organisasi	5
C. Sistematika Penyajian.....	7
BAB II.....	8
RENCANA KINERJA 2025	8
A. Perjanjian Kinerja 2025	8
B. PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RENCANA TARGET 2025	9
C. KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL 2025.....	11
BAB III.....	17
PENUTUP	17

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Tual 2025	8
Tabel 2 Program, Kegiatan, Output dan Anggaran Tahun 2025	9
Tabel 3 sebaran speedboat pengawasan pada wilayah kerja Pangkalan PSDKP Tual	13

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 struktur organisasi Pangkalan PSDKP Tual sesuai Permen KP 69 Tahun 2020..... 6

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan proses perencanaan yang setiap tahun dilaksanakan sebagai proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PSDKP 2025-2029. Rencana Kerja Tahunan Pangkalan Pengawasan SDKP Tual tahun 2025 menggambarkan kinerja tahunan yang ingin diwujudkan, disesuaikan dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2025. Maksud disusunnya Rencana Kerja Tahunan adalah untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan adalah sebagai acuan bagi Pangkalan Pengawasan SDKP Tual dalam menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran tahun 2025.

B. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi (TUSI) organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, maka dalam menjalankan tugasnya Kepala Pangkalan membawahi Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala seksi Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran, dan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana serta membawahi Kelompok Jabatan Fungsional, dimana masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan seperti diuraikan dibawah ini:

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi (TUSI) organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, maka dalam menjalankan tugasnya Kepala Pangkalan membawahi Kepala Sub Bagian Umum serta membawahi Kelompok Jabatan Fungsional, dimana masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan seperti berikut

1. Kepala Pangkalan:

Merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan manajerial dibidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta melakukan pembinaan kepada bawahan di lingkungan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tual untuk mencapai kelancaran pelaksanaan tugas.

2. Kepala Subbagian Umum:

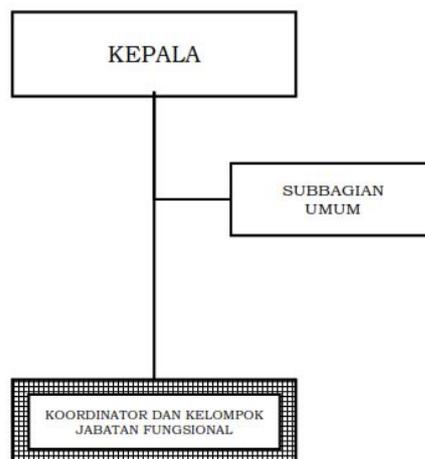
Melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan. Sesuai Peraturan MENPAN RB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi maka untuk membantu tugas Kepala Subbagian Umum maka dibentuklah tim kerja pada lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual yang terdiri atas

1. Ketua Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan;
2. Ketua Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan;
3. Ketua Tim Kerja Penanganan Pelanggaran;
4. Ketua Tim Kerja Prasarana, Sarana dan Operasi Kapal Pengawas.

3. Kelompok Jabatan Fungsional:

Fungsional Pengawas melaksanakan kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta kegiatan lain sesuai dengan tugas jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan untuk fungsional lainnya disesuaikan dengan bidang tugas fungsional yang diembannya berdasarkan SK fungsional yang telah ditetapkan.

STRUKTUR ORGANISASI PANGKALAN PSDKP TUAL



Gambar 1 struktur organisasi Pangkalan PSDKP Tual sesuai Permen KP 69 Tahun 2020

C. Sistematika Penyajian

Sistematika Penyajian Rencana Kerja Tahunan Pangkalan Pengawasan SDKP Tual tahun 2025, secara garis besar diuraikan sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan, dan tugas dan fungsi organisasi Pangkalan Pengawasan SDKP Tual.

2. Bab II Rencana Kinerja 2025

Menjelaskan tentang rencana target 2025, serta program prioritas Pangkalan Pengawasan SDKP Tual.

3. Bab III Penutup

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Rencana Kerja Tahunan Pangkalan Pengawasan SDKP Tual tahun 2025.

BAB II

RENCANA KINERJA 2025

A. Perjanjian Kinerja 2025

Tabel 1 Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Tual 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terselenggaranya pembinaan pokmaswas secara efektif	1. Indeks kualitas pembinaan pokmaswas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (indeks)	82
2.	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	2. Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan (nilai)	75
		3. Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan (nilai)	75
3.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	4. Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan (indeks)	100
4.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	5. Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan (indeks)	100
5.	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	6. Indeks operasi kapal pengawas (indeks)	92
		7. Indeks operasi speedboat pengawas (indeks)	92
6.	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	8. Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (%)	100
7.	Terselenggaranya penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	9. Indeks penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	81
		10. Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks)	81
8.	Terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	11. Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan (indeks)	94
9.	Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah, dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	12. Nilai kinerja perencanaan anggaran satker Pangkalan PSDKP Tual (nilai)	71,5
		13. Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satker lingkup Pangkalan PSDKP Tual (nilai)	92
		14. Indeks profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Tual (indeks)	81
		15. Penilaian mandiri SAKIP satker Pangkalan PSDKP Tual (nilai)	86
		16. Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko Pangkalan PSDKP Tual (%)	100
		17. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Tual yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	95
		18. Nilai kepuasan masyarakat pengguna layanan publik unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Tual (nilai)	88,5
		19. Nilai pengawasan kearsipan internal Pangkalan PSDKP Tual (nilai)	80
		20. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Pangkalan PSDKP Tual (inovasi)	1
		21. Nilai implementasi program budaya kerja (nilai)	70

B. PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RENCANA TARGET 2025

Tabel 2 Program, Kegiatan, Output dan Anggaran Tahun 2025

032.05.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Target	Pagu
2350	Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP		19,363,404,000
2350.999	Output Cadangan[Base Line]	1 Cadangan	489,031,000
2350.QHD	Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	87 Operasi	15,429,233,000
2350.QHD.001	Operasi Kapal Pengawas	67 Operasi	14,600,805,000
2350.QHD.003	Operasi Speedboat Pengawas	20 Operasi	828,428,000
2350.RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	1 Unit	1,300,000,000
2350.RBQ.001	Prasarana Pengawasan SDKP yang dibangun	1 Unit	1,300,000,000
2350.RCG	OM Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup	13 Unit	2,145,140,000
2350.RCG.001	Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Dirawat	13 Unit	2,145,140,000
2351	Penanganan Pelanggaran sektor Kelautan dan Perikanan		256,615,000
2351.AEA	Koordinasi	1 Kegiatan	50,000,000
2351.AEA.002	Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan	1 Kegiatan	50,000,000
2351.BCE	Penanganan Perkara	7 Perkara	206,615,000
2351.BCE.U03	Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi Administratif	5 Perkara	90,240,000
2351.BCE.U04	Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi Pidana	2 Perkara	116,375,000
2352	Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		1,809,869,000
2352.BHD	Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	2 Operasi	186,537,000
2352.BHD.001	Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan	1 Operasi	124,747,000
2352.BHD.002	Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Perikanan	1 Operasi	61,790,000
2352.BII	Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan	2 Laporan	30,000,000
2352.BII.002	Pengawasan pencemaran lingkungan sumber daya ikan	2 Laporan	30,000,000
2352.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	124 Lembaga	1,593,332,000
2352.QIC.001	Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya	40 Lembaga	646,332,000
2352.QIC.002	Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya	84 Lembaga	947,000,000
2353	Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan		100,000,000
2353.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	1 Klmp Msy	100,000,000
2353.QDD.001	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	1 Klmp Msy	100,000,000

2355	dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		19,982,733,000
2355.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	10 Unit	98,650,000
235.CAN.001	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	10 Unit	98,650,000
2355.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	6 Layanan	19,010,320,000
2355.EBA.956	Layanan BMN	1 Layanan	22,000,000
2355.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1 Layanan	23,300,000
2355.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1 Layanan	28,124,000
2355.EBA.962	Layanan Umum	1 Layanan	508,578,000
2355.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	26,720,000
2355.EBA.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan	18,401,598,000
2355.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	4 Unit	85,120,000
2355.EBB.951	Layanan Sarana Internal	4 Unit	85,120,000
2355.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	144 Orang	179,060,000
2355.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	144 Orang	179,060,000
2355.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	5 layanan/ Dok.	609,583,000
2355.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen	166,100,000
2355.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen	196,719,000
2355.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1 Layanan	75,760,000
2355.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	1 Layanan	122,950,000
2355.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1 Dokumen	48,054,000

C. KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL 2025

Berdasarkan DIPA Pangkalan PSDKP Tual tahun 2025, kegiatan prioritas nasional program pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan tahun 2025 di Pangkalan Pengawasan SDKP Tual meliputi:

1. Operasi Kapal Pengawas

Dalam upaya memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di laut, khususnya terhadap kegiatan *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* serta aktivitas lain yang berpotensi merusak Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP), Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) akan melaksanakan operasi pengawasan laut secara terencana dan terarah pada tahun 2025. Operasi ini akan mengerahkan dua kapal pengawas, yaitu Kapal Pengawas Hiu Macan 06 dan Kapal Pengawas Hiu 14, dengan alokasi masing-masing 67 hari operasi sepanjang tahun. Keberadaan kedua kapal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan mempersempit ruang gerak pelaku pelanggaran di laut.

Fokus Wilayah Operasi

Wilayah pengawasan akan diprioritaskan pada Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 714, 715, 717, dan 718, yang ditetapkan sebagai Zona III dalam penerapan Penangkapan Ikan Terukur (PIT). Keempat wilayah ini memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap praktik penangkapan ikan ilegal dan aktivitas lain yang dapat merusak sumber daya perikanan maupun ekosistem laut, seperti penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan maupun kegiatan penangkapan ikan tidak sesuai DPI.

Penempatan kapal pengawas pada masing-masing wilayah akan didasarkan pada analisis risiko dan intelijen lapangan, termasuk laporan masyarakat, data pemantauan satelit, serta hasil operasi sebelumnya. Dengan pendekatan ini, kapal pengawas dapat ditempatkan tepat sasaran, yaitu pada daerah yang disinyalir memiliki potensi pelanggaran tertinggi.

Tujuan dan Strategi Operasi

Operasi kapal pengawas ini bertujuan untuk:

1. Mencegah dan menindak praktik IUU Fishing di perairan Indonesia;
2. Mengawasi implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur, khususnya di Zona III;
3. Melindungi ekosistem laut dari kegiatan yang merusak, termasuk pencemaran dan

praktik penangkapan yang destruktif;

4. Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha perikanan melalui pengawasan yang konsisten dan berkelanjutan.

Strategi yang akan diterapkan mencakup pengawasan aktif (*active patrol*) dengan pola gerak yang dinamis, peningkatan koordinasi dengan pemantauan melalui *Vessel Monitoring System* (VMS) dan citra satelit.

2. Operasi Speedboat Pengawas

Pangkalan PSDKP Tual memiliki 11 armada speedboat pengawas. Dalam pelaksanaan tugasnya, speedboat memegang peranan penting sebagai unit pendukung yang strategis, meskipun memiliki wilayah operasi yang lebih terbatas dibandingkan kapal pengawas. Fungsi dan tugas speedboat pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan kapal pengawas, yakni melakukan pengawasan, pencegahan, dan penindakan terhadap aktivitas *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* serta pelanggaran lain yang mengancam keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP). Keterbatasan jangkauan speedboat justru menjadi keunggulan taktis dalam pengawasan di area-area perairan yang sulit dijangkau oleh kapal pengawas berukuran besar. Kecepatan dan kelincahan speedboat dapat merespons dengan cepat berbagai laporan atau indikasi pelanggaran, sehingga mampu menjadi garda terdepan dalam penindakan cepat terhadap pelaku pelanggaran di laut.

Speedboat ditempatkan secara terdistribusi pada Satuan Pengawasan (Satwas) dan Wilayah Kerja (Wilker) Pangkalan PSDKP Tual. Strategi distribusi ini dilakukan untuk mengoptimalkan efektivitas pengawasan, sehingga wilayah pengawasan yang luas dapat tercakup secara merata dan potensi terjadinya pelanggaran tidak luput dari pemantauan. Dengan demikian, speedboat tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai kekuatan pendukung utama yang memperkuat sistem pengawasan terpadu, khususnya dalam menutup celah pengawasan yang tidak dapat dijangkau oleh kapal pengawas utama.

Melalui sinergi antara kapal pengawas dan speedboat, Pangkalan PSDKP Tual mampu membangun sistem pengawasan yang adaptif, responsif, dan menyeluruh, yang menjadi kunci dalam menjaga kedaulatan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan yang menjadi tanggung jawabnya.

Tabel 3 sebaran speedboat pengawasan pada wilayah kerja Pangkalan PSDKP Tual

No	Unit Kerja	No	Spesifikasi Kapal		Kondisi
			Nama Kapal	Ukuran Panjang Kapal	
1	Pangkalan PSDKP Tual	1	Albacore 002	16 Meter	Baik
		2	<i>Rigid Inflatable Boat</i>	8 Meter	Baik
		3	KP. Hiu Macan 006	36 Meter	Baik
		4	KP. Hiu 14	14 Meter	Baik
		5	Napoleon 49	12 Meter	Baik
		6	Jetsky I	-	Baik
		7	Jetsky II	-	Baik
2	Satwas PSDKP Sorong	8	Napoleon 18	12 Meter	Baik
3	Satwas PSDKP Mimika	9	Napoleon 25	12 meter	Baik
4	Satwas PSDKP MTB	10	Napoleon 50	12 Meter	Baik
5	Wilker Raja Ampat	11	Napoleon 042	12 meter	Baik
		12	<i>Rubber Boat</i>	-	Baik
6	Wilker PSDKP Fakfak	13	Marlin 14	6 Meter	Baik

3. Prasarana Pengawasan SDKP yang Dibangun

Tahun 2025 Pangkalan PSDKP Tual berencana membangun Rumah Penampungan Sementara. Pembangunan ini bertujuan agar ABK non justicia dapat diberikan tempat tinggal yang layak ketika terjadi proses hukum pada kapal perikanan Dimana mereka bekerja. Ketersediaan dan optimalisasi prasarana pengawasan memiliki pengaruh langsung terhadap peningkatan kinerja pengawasan kelautan dan perikanan, antara lain:

1. Meningkatkan jangkauan pengawasan, terutama di wilayah rawan pelanggaran dan perairan terpencil;
2. Mempercepat respon penindakan, sehingga potensi kerugian negara akibat pelanggaran dapat ditekan;
3. Mendukung pengawasan berbasis intelijen dan data, sehingga kebijakan pengelolaan perikanan lebih tepat sasaran;
4. Memperkuat kedaulatan negara, khususnya dalam mencegah praktik IUU Fishing yang sering melibatkan kapal asing;
5. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, dengan pengawasan yang dapat dipantau dan dievaluasi secara sistematis.

4. Armada Pengawasan SDKP yang dirawat

Pangkalan PSDKP Tual memiliki 13 armada pengawasan yang siap mendukung pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) di wilayah kerjanya. Untuk memastikan armada tetap optimal, dilakukan program perawatan yang terstruktur dan

berkelanjutan. Perawatan dibagi menjadi tiga kategori utama. Perawatan rutin dilaksanakan sepanjang tahun, mencakup aspek teknis dan non-teknis untuk menjaga kinerja dan kesiapan kapal.

Perawatan darurat dilakukan secara kondisional saat terjadi kerusakan signifikan, dengan fokus pada perbaikan teknis yang memengaruhi operasional kapal. Selain itu, penyediaan suku cadang mesin dilakukan untuk mengganti komponen yang sudah tidak layak, memastikan performa mesin tetap prima, serta mendukung kelancaran pelaksanaan pengawasan SDKP. Dengan sistem perawatan yang terencana, Pangkalan PSDKP Tual mampu menjaga kesiapsiagaan armada, meningkatkan efektivitas pengawasan, dan memperkuat perlindungan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan.

5. Unit Usaha Sektor Kelautan yang diawasi Kepatuhanannya

Guna mendukung tercapainya pengawasan sumber daya kelautan maka Pangkalan PSDKP Tual melakukan pengawasan subsektor diantaranya, ¹⁾pengawasan Unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya. Kegiatan pengawasan akan dilaksanakan oleh pengawas kelautan maupun Polsus PWP3K terhadap dampak limbah yang dihasilkan dari semua jenis usaha baik perikanan maupun non perikanan yang berada dalam wilayah kerja Pangkalan PSDKP Tual. Pengawasan ini tidak hanya dilaksanakan secara rutin tapi juga secara insidental.²⁾pengawasan Unit usaha pemanfaatan Kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya, jumlah kawasan konservasi perairan yang diawasi ialah akumulasi hasil pengawasan kawasan konservasi perairan baik yang dilakukan oleh UPT Ditjen PSDKP, Pemerintah Provinsi, atau Pusat. Kawasan konservasi tersebut terdiri dari 10 (sepuluh) kawasan konservasi perairan nasional (KKPN) yang pengelolaannya dilakukan oleh Pusat dan 7 (tujuh) kawasan konservasi perairan daerah (KKPD) yang pengelolaannya dilakukan oleh Provinsi. Tahun 2025, Pangkalan Pengawasan SDKP Tual memiliki target 3 kawasan konservasi perairan yang diawasi yaitu di SAP Kepulauan Aru Tenggara, SAP Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya dan SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan Laut di sekitarnya. ³⁾Pengawasan terhadap kesesuaian pemanfaatan ruang laut yang merupakan perizinan dasar yang harus dipenuhi pelaku usaha apabila memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari serta pengawasan terhadap pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil.

6. Unit Usaha Sektor Perikanan yang diawasi Kepatuhannya

Pengawasan terhadap sektor perikanan terbagi atas 4 bagian diantaranya;

1. Pengawasan penangkapan ikan, Pelayanan terhadap penerbitan SLO telah melewati tahapan pemeriksaan administrative dan fisik untuk melihat kesesuaian antara kondisi real dan perizinan. Pemeriksaan terhadap kepatuhan peraturan tidak hanya dilihat Ketika armada akan menuju *fishing ground* akan tetapi pemeriksaan terhadap ketaatan akan peraturan juga dapat dilaksanakan saat kapal sedang melaksanakan patrol di laut dengan melihat apakah kapal tetap menyalakan VMS, menggunakan alat tangkap yang sesuai, tidak beroperasi melewati DPI yang tertera pada SIPI, tidak melakukan aktifitas penangkapan pada jalur yang dilarang dll. Selain pemeriksaan tersebut sesuai amanat PERDIRJEN PSDKP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan dimana pengawas perikanan akan mendatangi perusahaan dengan melakukan tahapan sebagaimana yang tertuang dalam perdirjen tersebut untuk menentukan kepatuhan dan kesesuaian berdasarkan KBLI dan BAP.
2. Unit usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya, Tidak jauh berbeda dengan pemeriksaan ketaatan penangkapan ikan pemeriksaan kepatuhan terhadap usaha pembudidayaan juga dilaksanakan dengan mengedepankan penguasaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta juknis yang telah ditetapkan seperti perencanaan, penerbitan SPT, pemberitahuan kepada *stakeholder* disertai daftar pertanyaan, inspeksi, melakukan pemeriksaan dan dituangkan pada BAP, form pemeriksaan kesesuaian KBLI, dan pendokumentasian serta pelaporan.
3. Unit usaha pengolahan ikan dan distribusi yang diperiksa kepatuhannya, pengawasan terhadap unit pengolahan dan distribusi tetap mengacu pada PERDIRJEN Nomor 6 Tahun 2021, dengan langkah-langkah yang telah dijabarkan sebelumnya. Pengawasannya akan difokuskan kepada kode KBLI sebagaimana yang tertuang pada perizinan berusaha unit usaha yang diawasi, apakah telah sesuai dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)

Pangkalan PSDKP Tual memiliki peran strategis dalam menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia (WPPNRI) 714, 715, dan 718. Salah satu pendekatan yang terus diperkuat adalah pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) sebagai mitra strategis dalam mendukung pengawasan berbasis masyarakat.

Pembinaan ini direncanakan secara terarah dan terukur untuk meningkatkan kapasitas, pengetahuan, dan partisipasi aktif masyarakat pesisir, khususnya kelompok nelayan, agar mampu mendeteksi, mencegah, serta melaporkan setiap indikasi pelanggaran seperti *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*, penangkapan ikan dengan bahan peledak, serta aktivitas merusak ekosistem laut.

Tujuan Pembinaan

Program pembinaan POKMASWAS diarahkan untuk:

1. Meningkatkan profesionalisme POKMASWAS melalui pelatihan dan penguatan kapasitas.
2. Memperkuat sinergi pengawasan antara PSDKP, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat.
3. Menciptakan sistem pelaporan yang cepat dan akurat melalui pemanfaatan teknologi informasi.
4. Mendorong kesadaran hukum dan kepedulian masyarakat dalam menjaga sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

BAB III

PENUTUP

Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang telah disusun ini menjabarkan secara detail dukungan Pangkalan Pengawasan SDKP Tual dalam pencapaian kinerja Ditjen PSDKP di tahun 2025, dan terlebih khusus dukungan terhadap pencapaian target Renstra Ditjen PSDKP 2025-2029.

Diharapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Pangkalan Pengawasan SDKP Tual yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik guna pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) Ditjen PSDKP tahun 2025.